

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP Dan Operasional PPID Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Adapun laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, Bab 1 adalah Pendahuluan, Bab 2 Referensi Hukum, Bab 3 membahas Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, Bab 4 Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Bab 5 membahas Kesimpulan Dan Saran.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP Dan Operasional PPID Tahun 2021 ini .

Medan, Januari 2022

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Bab 1 Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3 Sasaran.....	1
1.4 Keluaran.....	2
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan.....	2
1.6 Tenaga Pendukung.....	2
1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.....	3
1.8 Sistematika Pembahasan.....	3
<b>Bab 2 Referensi Hukum .....</b>	<b>4</b>
<b>Bab 3 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik. .</b>	<b>5</b>
3.1 Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	5
3.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik.....	12
3.3 Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya.....	12
3.4 Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2021.....	13
3.5 Berita Yang Dipublikasikan Pada Website Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2021.....	15
<b>Bab 4 Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....</b>	<b>16</b>
<b>Bab 5 Kesimpulan Dan Saran.....</b>	<b>16</b>

## **Bab 1**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan instrumen yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan cepat, informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan. Tanpa informasi, suatu perusahaan atau instansi tidak akan dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan atau instansi dengan baik. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan operasional yang baik dan teratur, maka diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi agar dapat mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan – badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Pada konteks inilah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan beserta hasil dan manfaatnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **I.2 Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar menunjang pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

#### **I.3 Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya informasi yang akurat terkait dengan semua aktifitas dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

#### **I.4 Keluaran**

Pada kegiatan ini, keluaran yang dihasilkan adalah disajikannya informasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk berita dan di tampilkan ke dalam web site yang telah tersedia sehingga bisa di akses oleh masyarakat dengan seluas-luasnya.

#### **1.5 Ruang Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain :

- A. Melakukan pembinaan terhadap pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
- B. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data.
- C. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi.
- D. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- E. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

#### **1.6 Tenaga Pendukung**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga pendukung. Tenaga pendukung yang dimaksud bertugas mengembangkan website, menginput seluruh bahan serta data terkait dengan seluruh pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, menyusun narasi berita dan menyusun laporan bulanan yang berisikan tentang penugasan yang telah dilaksanakan. Tenaga pendukung disyaratkan memiliki kualifikasi teknis sebagai berikut :

1. Tenaga Pendukung Pengembangan Website
  - a) Pendidikan Sarjana S-1 Teknologi Informatika/Teknologi Informasi/Sistem Informasi;
  - b) Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office;
  - c) Mampu merekam, mengedit, dan mengembangkan website pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara serta menginput berita kegiatan Dinas pada website;
  - d) Menguasai manage servis server berikut software pendukungnya;
2. Tenaga Pendukung Penulis
  - a) Pendidikan Sarjana S-1 Komunikasi;
  - b) Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office;
  - c) Mampu menyusun informasi sebagai bahan berita atas pelaksanaan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;

Adapun jangka waktu pekerjaan tenaga pendukung yang dimaksud selama 10 (sepuluh) bulan.

**1.7 Jangka Waktu Pekerjaan**

Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan.

**1.8 Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan pada kegiatan ini meliputi :

Bab 1 : Pada bab ini menguraikan antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, keluaran, ruang lingkup kegiatan, tenaga pendukung, jangka waktu pelaksanaan dan sistematika pembahasan.

Bab 2 : Bab ini berisikan referensi hukum yang terkait dala pelaksanaan kegiatan.

Bab 3 : Dalam bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Bab 4 : Pada bab ini menbahas Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .

Bab 5 : Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan Dan Saran.

## **Bab 2**

### **Referensi Hukum**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

## Bab 3

### Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguanan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

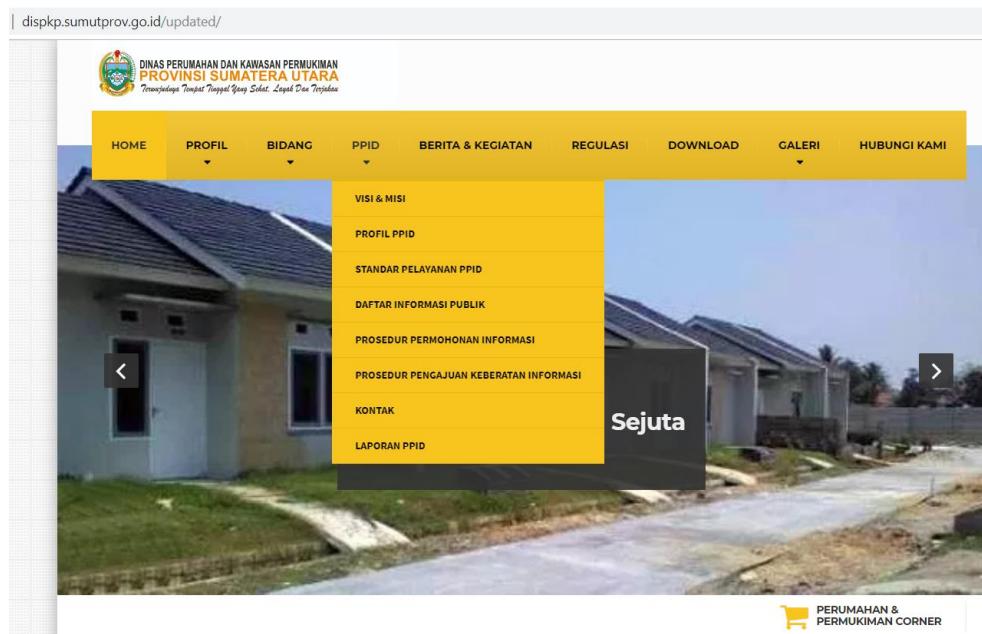
Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi barbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistik.

#### 3.1 Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Dalam rangka operasionalisasi PPID pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media, namun sebagai berikut :

##### A. Melalui website <http://dispkp.sumutprov.go.id>

##### Website Dan Aplikasi PPID

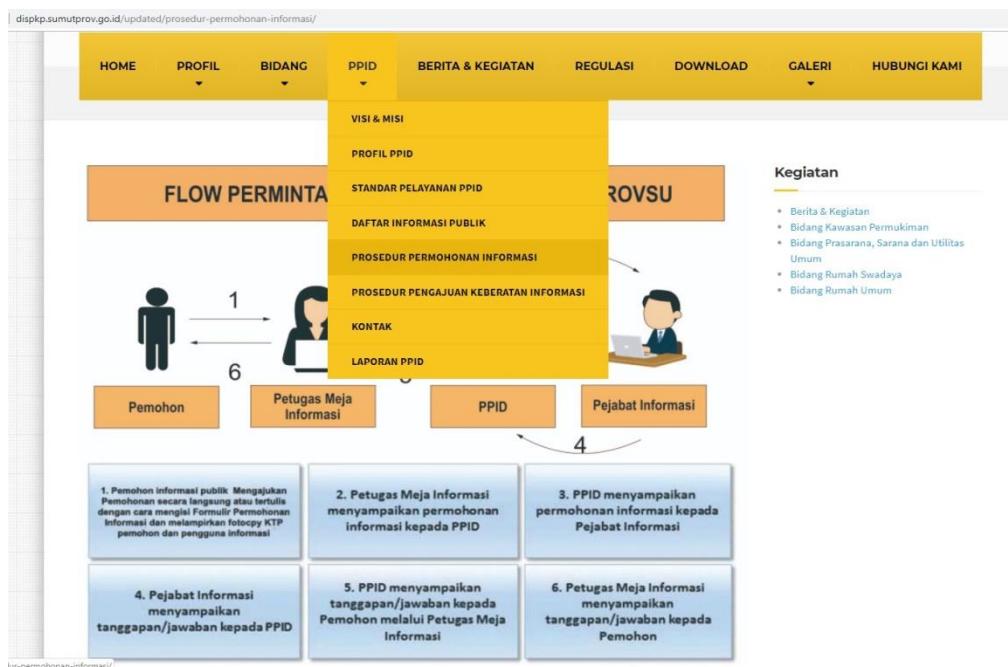


## Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID

### Daftar Informasi Publik Di Aplikasi PPID

The screenshot shows the official website of the Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) of Sumatra Utara. The header features the logo of the province and the text "DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA" with the motto "Terwujudnya Tempat Tinggal Yang Sehat, Layak Dan Terjangka". The main navigation menu includes links for HOME, PROFIL, BIDANG, PPID, BERITA & KEGIATAN, REGULASI, DOWNLOAD, GALERI, and HUBUNGI KAMI. The "PPID" menu is expanded, showing sub-links like VISI & MISI, PROFIL PPID, STANDAR PELAYANAN PPID, DAFTAR INFORMASI PUBLIK, PROCEDUR PERMOHONAN INFORMASI, PROCEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI, KONTAK, and LAPORAN PPID. On the right side, there is a sidebar titled "Kegiatan" listing various departmental activities.

### Prosedur Permohonan Informasi



## Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID

### Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi

dispkp.sumutprov.go.id/updated/prosedur-pengajuan-keberatan-informasi/

**PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI**

1. Pengajuan keberatan dapat dilakukan jika ditemui salah satu alasan berikut:

- a. Tidak disediakannya informasi berkala
- b. Penolakan atas permohonan informasi
- c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi
- d. Permohonan informasi publik ditanggung biaya
- e. Tidak dipenuhiya permohonan informasi
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
- g. Penyampaian informasi publik yang melanggar hak asasi manusia

2. Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis atau lisan.

**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI**

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan

2. atasan PPID Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara harus memberi tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut

3. Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai

4. Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

**FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN INFOMASI**

### Laporan PPID

dispkp.sumutprov.go.id/updated/laporan-ppid/

NO	Laporan Layanan Informasi Publik
1	Laporan Layanan Informasi Publik Ta. 2017
2	Laporan Layanan Informasi Publik Ta. 2018

Show 10 entries

**Kegiatan**

- Berita & Kegiatan
- Bidang Kawasan Permukiman
- Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- Bidang Rumah Swadaya
- Bidang Rumah Umum

## B. Pelayanan Informasi

### Mencuci Tangan

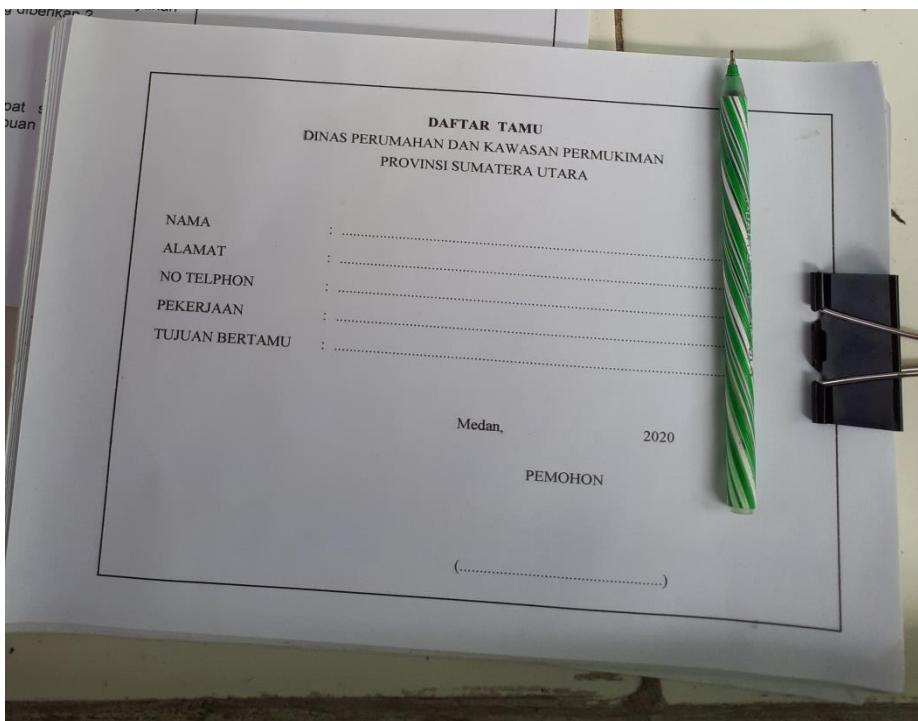
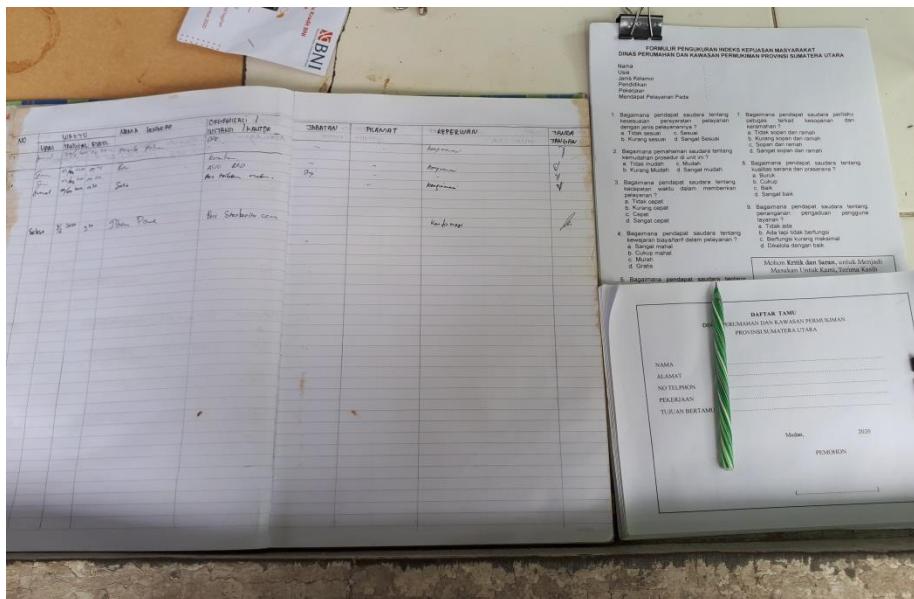
Setiap orang yang berkunjung ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu, diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan protocol kesehatan dan memakai masker serta pengecekan suhu badan untuk mencegah penyebaran Virus Covid – 19.



## Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID

### Mengisi Buku Tamu

Bagi setiap orang yang berkunjung ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu, harus mengisi Buku Tamu yang didalamnya berisikan tanggal kedatangan, nama, Instansi/Organisasi/Perseorangan, jabatan, alamat, keperluan dan tanda tangan. Pihak Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu berhak untuk tidak melayani pengunjung, jika memang dirasa tidak perlu untuk memberikan informasi.



## **Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID**

---

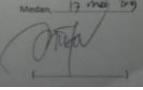
### **Tempat Terima Tamu**

Untuk mencegah penyebaran Virus Covid – 19, tamu yang berkunjung lebih dari satu orang di terima dan berdiskusi di tempat yang disediakan di luar ruangan kantor (*outdoor*).



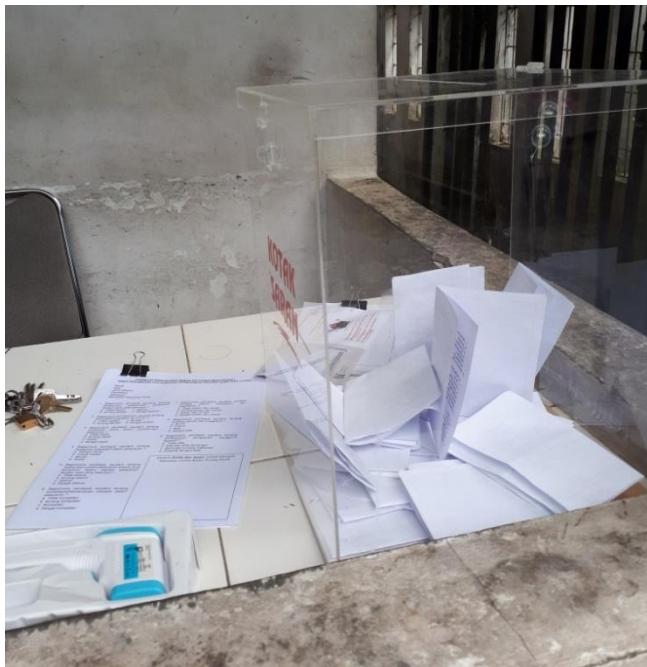
### **Mengisi Form Permintaan Informasi**

Sebelum memperoleh informasi lebih lanjut dan sebagai bahan data untuk dirangkum pada PPID, tamu yang berkunjung mengisi form yang telah disediakan yang memuat antara lain nama pengunjung, informasi yang diminta, yang melayani permintaan informasi dan tanggapan pemberi informasi.

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Nama	:
NIK / NIP	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Umur	:
Jenis Kelamin	:
Nomor Telepon	:
Asal Instansi	:
Tujuan Penggunaan Informasi	:
Informasi Yang Diminta	:
Pelayanan Informasi Oleh	
Tanggapan Pemberi Informasi	
Medan, _____ _____ _____ _____	
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Nama	: KESEKELUARAN BAGIAN 58
NIK / NIP	: KTP. 19700917 20110 1 003
Alamat	: Desa Banwematahe, Kec. Paragan
Pekerjaan	: POS
Umur	: 40 thn
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Nomor Telepon	: 081396274447
Asal Instansi	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkotaan Kab. Aceh Selatan
Tujuan Penggunaan Informasi	:
Informasi Yang Diminta	: Mengenai Uraian DAIC Afarmasi, Daik Reguler, BSpS
Pelayanan Informasi Oleh	
Tanggapan Pemberi Informasi	
Medan, 17 Mei 2024  _____ _____ _____ _____	

### **Kotak Saran**

Pengunjung setelah memperoleh informasi, selanjutnya akan mengisi kuesioner terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu serta saran-saran untuk peningkatan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang yang kemudian dimasukkan ke Kotak Saran. Adapun kuesioner tersebut akan diinput ke aplikasi Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Adapun jumlah responen yang telah mengisi kuesioner dan telah diinput berjumlah sebanyak 107 responen. (Hasil penilaian terlampir)



### **3.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik**

Secara operasional PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf, yaitu :

1. Kepala Dinas selaku Atasan PPID
2. Sekretrais Dinas selaku PPID Pembantu
3. Kasubbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik selaku Sekretaris PPID Pembantu.
4. Agus Tiawan Setiadi (Staf Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik) selaku Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi.
5. Samsul Efendi, SE (Kasubbag Keuangan) selaku Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi.
6. Dra. Beslida Sahmawati, M.Si (Kasubbag Umum) selaku Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.
7. Petugas Informasi dan Pembuat Berita masing-masing seksi :
  - A. Dedi Widayat, S.Kom
  - B. Zulfa Kamila, S.Ikom
  - C. Nanda Rahmana, S.Kom
  - D. Shalima, ST
  - E. Abdul Jalil Harianja, SE

### **3.3 Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya**

Tahun Anggaran 2021, melalui APBD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tersedia anggaran pada program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan administasi umum perangkat daerah subkegiatan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD dan dengan pagu anggaran sebesar 306.900.000 (Tiga Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Jasa Tenaga Pendukung sebesar Rp. 82.500.000,00, yang terdiri dari :
  - a. Belanja Jasa Tenaga Pendukung IT sebesar Rp. 49.500.000,00 sebanyak 1 (satu) orang selama 11 (sebelas) Bulan.
  - b. Belanja Jasa Tenaga Pendukung Penulis sebesar Rp. 33.000.000,00 sebanyak 1 (satu) orang selama 11 (sebelas) Bulan.

**Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID**

---

**3.4 Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2021**

No.	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Tujuan Penggunaan Informasi	Informasi Yang Diminta	Keputusan	Tanggal Jawaban
1	20 Januari 2021	Marlindo					
2	14 April 2021	Haris Ipol					
3	23 Februari 2021	Ayang					
4	08 Maret 2021	Drs. Yusrizal.S					
5	15 Maret 2021	Rusdi A. Harahap					
6	15 Maret 2021	Hasbi					
7	18 April 2021	Egi					
8	02 Maret 2021	A. Rahim Surbakti					
9	17 Maret 2021	Amril Gunawan					
10	20 April 2021	Niko					
11	26 April 2021	Muhammad Wiwin					

***Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID***

---

12	3 Mei 2021	Ismar Harahap					
13	4 Mei 2021	Evie					
14	11 Mei 2021	Helmy Yacub					
15	21 April 2021	Risman Lubis					
16	03 Juni 2021	Maknus					
17	10 Juni 2021	Gamy Styo					
18	06 Juni 2021	Ruslam					
19	15 September 2021	Aswin					
20	27 September 2021	Muhammad Fahri					
21	02 Agustus	Lison Aritonang					
22	10 Agustus 2021	H. Darwin					
23	09 September 2021	Riswan Lubis					
24	13 September 2021	Nugraha Z. Andre					

## **Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID**

---

25	09 Agustus 2021	Ivan Julyanto					
26	21 September 2021	Armansyah					
27	17 September 2021	Rickson. H					
28	13 September 2021	Ahmad Wibowo					
29	11 Oktober 2021	W. M Razah					
30	16 November 2021	Futra HSB					
31	17 November 2021	Ketua DPD Himperra Sumut					
32	02 November 2021	Amizaro Waruwu					

### **3.5 Berita Yang Dipublikasikan Pada Website Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2021**

Dalam rangka memberi informasi seluas-luasnya kepada publik, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menampilkan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk berita pada Website Dinas. Adapun untuk Tahun 2021, jumlah berita yang telah di tampilkan mulai Bulan Januari s/d Bulan Desember 2021 sebanyak 37 berita. Adapun berita tersebut terdiri dari kegiatan di lingkungan Kantor Dinas maupun kegiatan yang sifatnya di luar Kantor Dinas. (Kumpulan berita terlampir)

## **Bab 4**

### **Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Pada Tahun Anggaran 2021, pelayanan informasi belum bisa dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan adanya Virus Covid-19 , sehingga pelayanan melalui tatap muka langsung sangat terbatas. Kondisi ini juga ditambah dengan adanya jadwal WFH (*Work From House*) dan WFO (*Work From Office*), yang mana tingkat kehadiran ASN yang bekerja tidak 100 %. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana pendukung juga menjadi sebab masih belum maksimalnya pelayanan informasi.

## **Bab 5**

### **Kesimpulan Dan Saran**

Adapun kesimpulan akhir dari kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID antara lain :

- Website sebagai wadah publikasi kegiatan Dinas PKP Provsu;
- Sarana prasarana merupakan instrumen penting dalam pemberian informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Pelayanan informasi kepada masyarakat pada Tahun 2021 terbatas, karena adanya Virus Covid – 19.

Sedangkan saran dapat di uraikan sebagai berikut :

- Perlunya pengembangan website;
- Perlu peningkatan sarana prasarana pendukung;

## **1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu Mengadakan Uji Kompetensi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)**

February 17, 2021 Berita & Kegiatan

# **DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU MENGADAKAN UJI KOMPETENSI TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)**

Medan – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman mengadakan Uji Kompetensi kepada calon para peserta Tenaga Fasilitator Lapangan untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Kurang Mampu TA 2021, pada Rabu (17/02) di Aula Dinas PKP Provsu.

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Dinas PKP Provsu Ir. Anda Subrata “Seleksi yang dilakukan hari ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Fasilitaroe Lapangan yang berperan sebagai penggeral dan pendamping calon penerima bantuan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni, saya berharap Tenaga Fasilitator Lapangan yang terpilih adalah tenaga – tenaga yang memiliki semangat kerja tinggi dan berdedikasi serta memberikan pencapaian kinerja dalam kegiatan Rumah Tidak Layak Huni” ujarnya.



Ujian Kompetensi terdiri dari Ujian Tertulis, Ujian Komputer dan Wawancara Peserta yang mengikuti ujian dibagi dalam 5 hari waktu pelaksanaan mulai dari 17 Februari sampai 23 Februari, dalam satu sesi ujian peserta terbatas hanya 25 orang dan wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ujian dimulai pukul 08.00 -12.00 untuk Gelombang I dan Gelombang II mulai dari pukul 14.00 – 18.00.

Tenaga Fasilitator yang terpilih nantinya akan disebar di 10 Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten

Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Simalungun. (ulfa)

## **2. Pelantikan Kepala Dinas PKP Provsu**

## PELANTIKAN KEPALA DINAS PKP PROVSU

Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik dan mengambil sumpah pejabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Supryanto, MM di Aula Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, pada Kamis (18/02).

Pelantikan ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/569/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprovsu. Gubsu melantik para pejabat hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pelantikan Kadis PKP Provsu bersama dengan 12 pejabat Eselon II lainnya.



Dalam pelantikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan kepada jajaran yang dilantik untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Acara pelantikan tersebut Gubernur juga didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah dan Sekdaprovsu Dr. Hj. Sabrina.(ulfa)

### 3. Ramah Tamah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## RAMAH-TAMAH KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan acara ramah-tamah dengan Kadis PKP yang baru dilantik Ir. Supryanto, MM, bertempat di Aula Kantor Dinas PKP Provsu. Acara diawali dengan sambutan selamat datang oleh Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata, “selamat datang dan selamat bergabung di Dinas PKP Provsu, salam sehat dan kami semua siap menerima arahan dan perintah dari bapak Kadis” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Kadis PKP yang baru dilantik menyampaikan agar mendapat dukungan dan bekerjasama untuk memajukan Dinas PKP Provsu. “mari kita sama-sama bekerja sesuai dengan SOP dan tupoksi

Dinas PKP Provsu yang ada” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan perkenalan dengan para pejabat struktural, staff masing-masing bidang dan diakhiri dengan sesi foto bersama.(ulfa)



#### **4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menerima Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar**

February 24, 2021 Berita & Kegiatan |

## **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MENERIMA KUNJUNGAN KERJA DARI KOMISI III DPRD KOTA PEMATANG SIANtar**

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar. Kunjungan ini dipimpin oleh Timbul Marganda Lingga. Pertemuan diadakan di Aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (24/02).

Kunjungan kerja disambut oleh Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata mewakili Kepala Dinas PKP, didampingi oleh Kasi dan Kabid di lingkungan Dinas PKP Provsu. Dalam kunjungannya Komisi III DPRD Kota Pematang siantar ingin berkordinasi dan berkonsultasi tentang konsep-konsep penataan perumahan berbasis ramah lingkungan dan penataan Kawasan kumuh.

“kami mempunyai permukiman kumuh yang luasnya masuk dalam yang bisa ditangani oleh Provinsi, tapi setahun ini belum ada kegiatan yang terkait dengan penataan Kawasan kumuh sampai ke Kota Pematang Siantar, kami ingin Kawasan kumuh di

Kota Pematang Siantar mendapat perhatian dari Provinsi dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan Provinsi, apa yang harus kami persiapkan agar mendapat perhatian dari Provinsi” ujar Timbul.

Anda Subrata menjelaskan “mengenai keinginan pemerintah pematang siantar mengenai penataan kawasan kumuh ada di UU NO.1 Tahun 2011, tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tertuang didalamnya, menurut UU tersebut Kawasan kumuh yang ditangani oleh Provinsi sebesar 10-15 Ha, jika luasan dibawah itu merupakan kewenangan Kab/Kota, kami juga menunggu SK Kawasan Kumuh tahun ini segera diterbitkan, ini juga merupakan prioritas kami

untuk menuntaskan Kawasan yang merupakan kewenangan kami” ujar Anda.

“hanya saja tidak mungkin melakukan penataan Kawasan Kumuh secara bersamaan di 33 Kab/Kota, karena kita tau anggaran terbatas dan mengalami penyusutan karena adanya pandemi yang masih berlangsung. Tahun ini tidak ada untuk penataan Kawasan Kumuh untuk semua kabupaten/kota, kemungkinan Tahun 2022, tahun ini kita menyiapkan regulasi untuk percepatan penanganan Kawasan Kumuh” tambahnya.

Acara diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)



## 5. Dinas PKP Provsu Menerima Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kab. Tapanuli Tengah

March 5, 2021 Berita & Kegiatan

### DINAS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KAB. TAPANULI TENGAH



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari Komisi C DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Kunjungan ini dipimpin oleh A. Melfan Tanjung Pertemuan diadakan di Aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasutio No.20 Medan (05/03).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas Ir. Supryanto, MM didampingi Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata dan Kabid Rumah Swadaya Indra Sakti Hrp. Dalam kunjungannya Komisi C Kab. Tapanuli Tengah meminta petunjuk terkait pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) TA. 2021 “apa saja syarat untuk penerima bantuan RTLH agar kami bisa menjelaskan ke masyarakat yang merasa dia merasa berhak menerima bantuan tetapi

malah orang lain yang mendapatkan bantuannya” ujar melfan.

Supryanto menjelaskan bahwa “setiap usulan kegiatan semua yang akan ditampung harus diverifikasi dan memastikan semua sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada” jelasnya.

Kabid Rumah Swadaya menambahkan “syarat penerima bantuan RTLH harus memiliki KTP, Kartu Keluarga(KK), memiliki tanah dengan legalitas, memiliki dan menempati rumah satu-satunya, belum pernah menerima bantuan RTLH atau bantuan sejenis lainnya, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) dan penerima juga sanggup berswadaya dalam pelaksanaannya harus dipenuhi agar bisa menerima bantuan tersebut. Kegiatan RTLH juga harus sesuai dengan jadwal pelaksanaan jika kegiatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai jadwal berat harapan untuk bisa melanjutkan kegiatan tersebut ditahun berikutnya” tambah Indra.

Setelah diskusi, acara diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)



## **6. Kunjungan Kerja Bupati Labuhanbatu Utara Ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu**

March 9, 2021 Berita & Kegiatan |

# **KUNJUNGAN KERJA BUPATI LABUHANBATU UTARA KE DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU**

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus berserta rombongan di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (09/3).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kadis PKP Provsu Supryanton didampingi oleh Sekretaris Dinas PKP, Kabid Rumah Swadaya dan Kabid Rumah Umum. Dalam kunjungannya Hendriyanto ingin mendiskusikan mengenai Koordinasi bantuan untuk 17ribu RTLH yang sudah terdata di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan meminta petunjuk untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintahan pusat, sekaligus mengenai banjir bandang yang pernah terjadi di Labura tetapi belum terselesaikan hingga saat ini.



Dalam pertemuan ini Supryanto menjelaskan bahwa dari “data tujuh belas ribu rumah tidak layak huni yang ada di Kab. Labuhanbatu Utra harus dilihat mana yang bisa masuk kriteria untuk mendapatkan bantuan RTLH, program BSPS atau malah menjadi wewenang Dinas/Kementerian Sosial” jelasnya.



Selanjutnya Saiful Zuhri Kabid Rumah Umum menambahkan “untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR, Kabupaten Labura harus aktif untuk menginput data ke dalam aplikasi Sibaru” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Indra Sakti Harahap juga menjelaskan “syarat penerima bantuan RTLH harus memiliki KTP, Kartu Keluarga(KK), memiliki tanah dengan legalitas, memiliki dan menempati rumah satu-satunya, belum pernah menerima bantuan RTLH atau bantuan sejenis lainnya, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) dan penerima juga sanggup berswadaya dalam pelaksanaannya harus dipenuhi agar bisa menerima bantuan.(ulf)

## 7. Kepala Dinas PKP Provsu Melakukan Peninjauan Ruang Kerja Pegawai

March 10, 2021 Berita & Kegiatan

### KEPALA DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN PENINJAUAN RUANG KERJA PEGAWAI



Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Supryanto melakukan peninjauan ke seluruh ruang kerja pegawai, guna melihat ketersediaan fasilitas di kantor Dinas PKP Provsu. Dalam peninjauan tersebut Supryanto menerima masukan dari pegawai mengenai fasilitas kantor. Supryanto menyampaikan disamping fasilitas kantor yang lengkap dekorasi ruangan juga berperan penting untuk kenyamanan dalam bekerja.(ulf)



## **8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Menerima Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kab. Karo**

March 12, 2021 Berita & Kegiatan

# **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KAB. KARO**

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Komisi C DPRD Kab. Karo yang dipimpin oleh Iriani Tarigan. Pertemuan didakan di aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (12/03).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto didampingi Sekretaris Dinas Anda Subrata. Pada kesempatan tersebut anggota Komisi C DPRD Kab. Karo Badri Barus dan Lusia Sukande menyampaikan “meminta petunjuk mengenai tata perumahan bidang layanan permukiman, mengenai syarat bedah rumah” ujar badri, kemudian ditambahkan oleh lusia “mengenai indikator untuk mendapatkan bedah rumah, sehingga bisa kami menjelaskan jika ada masyarakat yang bertanya” tambah lusia.



Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto menjelaskan “mengenai kriteria RTLH dimulai dari data penerima surat bupati, kemudian pemprovsu juga mempunyai tim untuk memverifikasi Kembali dari daftar nama yang ada, jika ada yang berbeda dilapangan Dinas PKP Provsu berkoordinasi dengan Dinas PKP Kab/Kota untuk berdiskusi” jelasnya.

Anda Subrata menambahkan “syarat RTLH rumahnya tidak layak dan masuk ke dalam SK Bupati, RTLH sendiri dimaksudkan untuk menstimulus masyarakat untuk ikut berswadaya dalam membangun rumah menjadi layak huni” tambah Anda.

Setelah diskusi acara diakhiri dengan foto Bersama.

(ulfa)

## 1. Dinas PKP Provsu Menerima Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kab. Tapanuli Tengah

March 5, 2021 Berita & Kegiatan

### DINAS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KAB. TAPANULI TENGAH



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari Komisi C DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Kunjungan ini dipimpin oleh A. Melfan Tanjung Pertemuan diadakan di Aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasutio No.20 Medan (05/03).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas Ir. Supryanto, MM didampingi Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata dan Kabid Rumah Swadaya Indra Sakti Hrp. Dalam kunjungannya Komisi C Kab. Tapanuli Tengah meminta petunjuk terkait pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) TA. 2021 “apa saja syarat untuk penerima bantuan RTLH agar kami bisa menjelaskan ke masyarakat yang merasa dia merasa berhak menerima bantuan tetapi

malah orang lain yang mendapatkan bantuannya” ujar melfan.

Supryanto menjelaskan bahwa “setiap usulan kegiatan semua yang akan ditampung harus diverifikasi dan memastikan semua sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada” jelasnya.

Kabid Rumah Swadaya menambahkan “syarat penerima bantuan RTLH harus memiliki KTP, Kartu Keluarga(KK), memiliki tanah dengan legalitas, memiliki dan menempati rumah satu-satunya, belum pernah menerima bantuan RTLH atau bantuan sejenis lainnya, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) dan penerima juga sanggup berswadaya dalam pelaksanaannya harus dipenuhi agar bisa menerima bantuan tersebut. Kegiatan RTLH juga harus sesuai dengan jadwal pelaksanaan jika kegiatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai jadwal berat harapan untuk bisa melanjutkan kegiatan tersebut ditahun berikutnya” tambah Indra.

Setelah diskusi, acara diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)



## **2. Kunjungan Kerja Bupati Labuhanbatu Utara Ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu**

March 9, 2021 Berita & Kegiatan |

# **KUNJUNGAN KERJA BUPATI LABUHANBATU UTARA KE DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU**

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus berserta rombongan di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (09/3).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kadis PKP Provsu Supryanton didampingi oleh Sekretaris Dinas PKP, Kabid Rumah Swadaya dan Kabid Rumah Umum. Dalam kunjungannya Hendriyanto ingin mendiskusikan mengenai Koordinasi bantuan untuk 17ribu RTLH yang sudah terdata di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan meminta petunjuk untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintahan pusat, sekaligus mengenai banjir bandang yang pernah terjadi di Labura tetapi belum terselesaikan hingga saat ini.



Dalam pertemuan ini Supryanto menjelaskan bahwa dari “data tujuh belas ribu rumah tidak layak huni yang ada di Kab. Labuhanbatu Utra harus dilihat mana yang bisa masuk kriteria untuk mendapatkan bantuan RTLH, program BSPS atau malah menjadi wewenang Dinas/Kementerian Sosial” jelasnya.

Selanjutnya Saiful Zuhri Kabid Rumah Umum menambahkan “untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR, Kabupaten Labura harus aktif untuk menginput data ke dalam aplikasi Sibaru” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Indra Sakti Harahap juga menjelaskan “syarat penerima bantuan RTLH harus memiliki KTP, Kartu Keluarga(KK), memiliki tanah dengan legalitas, memiliki dan menempati rumah satu-satunya, belum pernah menerima bantuan RTLH atau bantuan sejenis lainnya, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) dan penerima juga sanggup berswadaya dalam pelaksanaannya harus dipenuhi agar bisa menerima bantuan.(ulf)



### 3. Kepala Dinas PKP Provsu Melakukan Peninjauan Ruang Kerja Pegawai

March 10, 2021 Berita & Kegiatan

## KEPALA DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN PENINJAUAN RUANG KERJA PEGAWAI



Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Supryanto melakukan peninjauan ke seluruh ruang kerja pegawai, guna melihat ketersediaan fasilitas di kantor Dinas PKP Provsu. Dalam peninjauan tersebut Supryanto menerima masukan dari pegawai mengenai fasilitas kantor. Supryanto menyampaikan disamping fasilitas kantor yang lengkap dekorasi ruangan juga berperan penting untuk kenyamanan dalam bekerja.(ulf)



### 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Menerima Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kab. Karo

## DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KAB. KARO

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Komisi C DPRD Kab. Karo yang dipimpin oleh Iriani Tarigan. Pertemuan didakan di aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (12/03).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto didampingi Sekretaris Dinas Anda Subrata. Pada kesempatan tersebut anggota Komisi C DPRD Kab. Karo Badri Barus dan Lusia Sukande menyampaikan “meminta petunjuk mengenai tata perumahan bidang layanan permukiman, mengenai syarat bedah rumah” ujar badri, kemudian ditambahkan oleh lusia “mengenai indikator untuk mendapatkan bedah rumah, sehingga bisa kami menjelaskan jika ada masyarakat yang bertanya” tambah lusia.



(ulfra)

Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto menjelaskan “mengenai kriteria RTLH dimulai dari data penerima surat bupati, kemudian pemprovsu juga mempunyai tim untuk memverifikasi Kembali dari daftar nama yang ada, jika ada yang berbeda dilapangan Dinas PKP Provsu berkoordinasi dengan Dinas PKP Kab/Kota untuk berdiskusi” jelasnya.

Anda Subrata menambahkan “syarat RTLH rumahnya tidak layak dan masuk ke dalam SK Bupati, RTLH sendiri dimaksudkan untuk menstimulus masyarakat untuk ikut berswadaya dalam membangun rumah menjadi layak huni” tambah Anda.

Setelah diskusi acara diakhiri dengan foto Bersama.

## 5. Audiensi DPRD dan BAPPEDA Pemkab Serdang Bedagai ke Dinas PKP Provsu

March 17, 2021 Berita & Kegiatan

### AUDIENSI DPRD DAN BAPPEDA PEMKAB SERDANG BEDAGAI KE DINAS PKP PROVSU

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja DPRD Kab. Serdang Bedagai dan Bappeda Kab. Serdang Bedagai berserta rombongan di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (17/03).

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto bersama Sekretaris Dinas PKP Provsu Anda Subrata dan Eselon III dan IV. Kepala Bappeda Sergai Prihatinah menyampaikan ingin meminta arahan dan petunjuk mengenai "Penataan Kawasan rel kereta api oleh PT. KAI di wilayah Desa Deli Muda Hilir, Kec. Perbaungan, penggusuran ini membuat masyarakat disekitar rel kereta api mengajukan permohonan kepada kecamatan dan kepada DPRD memohon agar mendapat fasilitas untuk pembangunan perumahan yang berada di skala perkotaan seperti pembangunan rusunawa, kami ingin mendapatkan informasi apa bisa program pembangunan rusunawa dilokasi yang sudah MOU dengan PT. KAI" ujar prihatinah.

Ketua DPRD Kab. Sergai Riski juga menyampaikan hal senada "karena adanya penggusuran oleh PT. KAI, kami berharap adanya program rusunawa ataupun program lain terkait bantuan ke masyarakat karena jika berharap kepada anggaran Kab. Serdang Bedagai karena banyaknya refocusing untuk penanganan COVID-19 hampir semua OPD tidak bisa bekerja secara maksimal, kami berharap ada arahan dan petunjuk untuk masvarakat di Kab. Serdang Bedagai" jelasnya.



Anda Subrata menjelaskan "memang SPM Dinas PKP Provsu salah satunya merelokasi rumah akibat korban bencana dan merelokasi rumah korban pembangunan pemerintah, namun demikian kami harus mengetahui terlebih dahulu grand desain dari relokasi ini, maupun rencana relokasi ini dari pemerintah daerah kabupaten. Tahun ini kami melakukan relokasi korban banjir di Kab. Madina tahun ini, terkait keinginan bapak/ibu sekalian tidak bisa dilakukan tahun ini, mungkin bisa diusahakan untuk tahun 2022" jelasnya.

Kabid Rumah Umum Saiful Zuhri menambahkan "sepadan kereta api memang banyak dimanfaatkan warga yang tidak mampu, terkait

dengan penanganan ini, apakah disiapkan rumah sewanya, rumah susunnya yang kita bantu memang semua masyarakat yang penghasilannya dibawah UMP, Pemerintah Kab. Sergai bisa menyiapkan rencana aksi dan proposal untuk pengusulan rumah susun yang ditanda tangani Bupati ditujukan kepada Kementerian PUPR melalui aplikasi Sibaru, Dinas PKP Provinsi bertugas untuk memonitor apa yang ada di e-planning Sibaru, Bappeda dan DPRD harus bekerjasama dengan Dinas PKP Kab. Sergai dan melampirkan semua berkas proposal" tambahnya.

Kadis PKP Provsu Supryanto menambahkan "dalam pengusulan pembangunan rumah susun atau rumah couple untuk korban pembangunan pemerintah perlu memastikan urusan lahan sudah selesai karena baik bantuan dari pemprov atau dari pusat tidak ada bantuan pembebasan lahan" tambahnya.

Acara diakhiri dengan foto bersama.

## 6. Kadis PKP Provsu membuka Acara Rapat Sinkronisasi Program Pusat-Daerah Bidang Perumahan Tahun 2021

March 23, 2021 Berita & Kegiatan

### KADIS PKP PROVSU MEMBUKA ACARA RAPAT SINKRONISASI PROGRAM PUSAT-DAERAH BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2021



Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Supryanto membuka Rapat Sinkronisasi Program Pusat-Daerah Bidang Perumahan Tahun 2021, diadakan di Hotel Santika Dyandra Medan Jl. Kapten Maulana Lubis No. 7 pada 23-24 Maret 2021.

Dalam pembukaannya Supyanto menyampaikan "menurut data BPS tahun 2020 menyatakan akses rumah layak huni di Sumatera Utara sebesar 53,55%. Hal ini menjadi perhatian kita Bersama untuk meningkatkan akses tersebut, dengan Langkah-langkah kerja yang baik dan saling mendukung meningkatkan akses rumah layak huni. Dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk merencanakan

program / kegiatan yang tepat sasaran. Diperlukan dukungan dari setiap stakeholder terkait baik di pusat maupun di daerah" ujarnya.

"pengusulan bantuan bidang perumahan di tiap-tiap daerah diperlukan koordinasi yang baik antara balai pelaksana Penyediaan Perumahan selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dengan pemerintah Provinsi maupun kab/kota. Usulan harus disiapkan secara serius dengan menyediakan kriteria kesiapan sesuai kegiatan yang diusulkan. Dengan penggunaan teknologi informasi aplikasi SIBARU yang telah membantu kita bekerja di perangkat yang sama dan bisa diakses Bersama tentunya ini mempermudah kita berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat" tambahnya.

Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera Utara II Rusli menyampaikan "dalam rangka sinkronisasi pusat-daerah ini perihal infrastuktur yang sudah dibangun di daerah yang asetnya masih bermasalah mohon bantuanmu, terkait rusun, psu supaya proses lebih cepat selesai. Kemudian Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy singkronisasi pusat dan daerah penanganan masalah penanganan Kawasan banjir yang masih kesulitan dimasalah lahan, dimohon kepada dinas terkait agar berkoordinasi agar menjadi lebih singkron. Dan pendataan perumahan baik RLTH maupun rumah yang sudah terbangun di Kab/Kota agar medapatkan pendataan perumahan lebih akurat mengenai backlog perumahan sehingga nilai pendataan perumahan di Sumatera Utara meningkat" ujarnya

Acara dilanjutkan dengan sesi panel diskusi yang diisi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Perwakilan Direktorat Rumah Susun.(ulf)



## **7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Menerima Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kota Sibolga**

March 26, 2021 Berita & Kegiatan |

### **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPRD KOTA SIBOLGA**



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Sibolga yang dipimpin oleh Syuryanty Sidabutar. Pertemuan diadakan di aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (26/03).

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Bidang Rumah Swadaya Indra Sakti Harahap yang mewakili Kepala Dinas PKP Provsu karena masih melaksanakan musrembang di Kab. Samosir. Pada kesempatan tersebut Syuryanty Sidabutar menyampaikan “untuk mendapatkan bantuan RTLH apa saja syarat yang harus dipenuhi, selain itu bantuan apa saja yang bisa diberikan kepada Kota Sibolga sesuai dengan tupoksi Dinas PKP Provsu” ujarnya

Indra Harahap menjelaskan “RTLH merupakan perintah UU dan ada didalam Peraturan Gubernur Sumut, dan ada 3 bagian

kewenangan mulai dari luas lahan lebih 15 Ha merupakan kewenangan Provinsi dan luas lahan dibawah 10 Ha merupakan kewenangan Kab/Kota. Mengenai kriteria RTLH dimulai dari data penerima surat bupati, kemudian pemprovsu juga mempunyai tim untuk memverifikasi Kembali dari daftar nama yang ada, jika ada yang berbeda dilapangan Dinas PKP Provsu berkoordinasi dengan Dinas PKP Kab/Kota untuk berdiskusi.

Kemudian Pelaksana Kepala Seksi Rumah Swadaya Armada juga menambahkan “pada pramusrenbang 2021, Kota Sibolga mengusulkan 100 unit untuk RTLH dan penataan Kawasan kumuh 1 kawasan, kami juga meminta bapak/ibu DPRD untuk saling terlibat dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas PKP Kab/Kota dan Bappeda, kewenangan Provinsi dengan luas kawasan 10-15 Ha, dengan luasan satu hamparan dan harus masuk ke dalam SK Kumuh yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sibolga.

Acara Kunjungan Kerja diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)



## **1. Kepala Dinas PKP Provsu mewakili Gubernur Sumatera Utara dalam memberikan Kata Sambutan Musrembang Kab. Dairi**

April 5, 2021 Berita & Kegiatan |

### **Kepala Dinas PKP Provsu mewakili Gubernur Sumatera Utara dalam memberikan Kata Sambutan Musrenbang Kab. Dairi**



Sidikalang, Kab. Dairi – Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto mewakili Gubernur Sumatera Utara dalam memberikan kata sambutan pada Pembukaan Musrembang RKPD Kab. Dairi di Balai Budaya Sidikalang Dairi (05/04).

Dalam pembukaannya “Forum musrembang ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis dimana seluruh pemangku kepentingan dalam rnsnka penajaman, penyelesaian dan klarifikasi terhadap usulan rencana pembangunan sehingga tercapainya kesepakataan rancangan RKPD tahun 2022 yang telah disusun pemerintah kabupaten Dairi”

ujarnya.

“berdasarkan hasil evaluasi serta pengembangan kondisi ekonomi dan sosial, Pemerintah Pusat kembali menegaskan bahwa pendekatan penyusunan RKP tahun 2022 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan Money Follow Program priority. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spesial” imbuhnya

“RKP tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan melalui tujuh agenda pembangunan yaitu: ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pengembangan kebudayaan, insfraktruk untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup, ketahanan, bencana dan perubahan iklim, stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik” tambahnya

“selaras dengan rancangan tema RKP Tahun 2022 yakni pemulihran ekonomi dan reformasi structural dan visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. Berdasarkan prioritas pembangunan provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 berserta tema yang telah disampaikan, maka dalam upaya pencapaian target pembangunan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, kami meminta agar pemerintah Kabupaten Dairi dapat mempedomani dan menselaraskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan Kab. Dairi dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara” tutupnya mengakhiri pidato pembukaan musrembang RKPD Kab. Dairi.

Acara dilanjutkan dengan paparan diskusi yang diisi oleh Kepala Bappeda Provsu, Kepala BPS Kab. Dairi, Kepala Bappeda Kab. Dairi, BPPW SU Kementerian PUPR, BPODT, BPJN Kementerian PUPR dan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.



## **2. Dinas PKP Provsu mengadakan Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara**

## DINAS PKP PROVSU MENGADAKAN RAPAT KOORDINASI DAN PENYAMPAIAN USULAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara di Hotel Swiss-Bellin Medan (Senin, 05/04).

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Dinas PKP Provsu Anda Subrata mewakili Kepala “Program bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan stimulan berupa bahan bangunan/material untuk rumah swadaya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bagi masyarakat kurang mampu untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah” ujarnya.

“Kegiatan perbaikan RTLH dilaksanakan dengan pola swadaya



masyarakat yang dimana masyarakat berperan penting dalam proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan” jelasnya.

“Rapat koordinasi dan penyampaian usulan ini bertujuan agar telaksananya sinkronisasi kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berbasis pada database yang akurat dan akuntabel serta terjalin sinergis antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal peningkatan kualitas Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan pengusulan RTLH, petunjuk teknis RTLH dan sharing pengalaman kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. (ulfa)

### **3. Dinas PKP Provsu melakukan Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**

April 6, 2021 Berita & Kegiatan • Bidang Rumah Swadaya |

#### **DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN PELATIHAN DAN PEMBEKALAN FASILITATOR KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu melakukan Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas diatas 10 HA sampai dengan 15 HA di Provinsi Sumatera Utara T.A 2021 di Hotel Swiss-Bellinn Medan (Selasa, 06/04).

Pembukaan dilakukan oleh Supryanto selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu “Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah salah satu program Pemerintah dalam menangani kebutuhan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan melibatkan swadaya masyarakat” ujarnya.

“Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui pemberian bahan bangunan sebagai stimulant kepada penerima manfaat. Pemerian bahan bangunan disertai dengan pendampingan yang diharapkan membangkitkan motivasi dan prakarsa rumah tangga dalam meningkatkan fisik rumah” tambahnya.

“Faktor keberhasilan program ini yaitu adanya pendampingan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang diharapkan memiliki kapasitas dan kualitas yang handal dan baik dari sisi teknis maupun pemberdayaan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pendamping, sumber ilmu dan motivator atau penggerak masyarakat” jelasnya.

Acara Pelaksanaan Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas diatas 10 HA sampai dengan 15 HA di Provinsi Sumatera Utara T.A 2021 dilakukan mulai tanggal 06 – 09 April 2021. Pelatihan dan Pembekalan dilakukan agar TFL dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya agar dapat mendukung pelaksanaan rehab RTLH sehingga rehab RTLH dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.(ulfa)

**4.**



## **Peniadaan Mudik Lebaran 2021, Edy Rahmayadi Pastikan Petugas Bekerja 24 jam di 73 Posko.**

May 2, 2021 Berita & Kegiatan |

### **Peniadaan Mudik Lebaran 2021, Edy Rahmayadi Pastikan Petugas Bekerja 24 Jam di 73 Posko**



MEDAN, 30/4 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Forkopimda menyusun skema peniadaan mudik Lebaran tahun 2021.

Pada rapat Peniadaan Mudik Lebaran yang diselenggarakan Jumat (30/4) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41 tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memastikan petugas akan bekerja 24 jam dan peniadaan mudik Lebaran akan berjalan dengan baik.

Ada 73 posko yang didirikan untuk penyekatan mudik di tahun ini, 10 posko untuk perbatasan antarprovinsi dan 63 posko untuk perbatasan antarkabupaten/kota. Posko-posko tersebut diisi oleh Polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Petugas di posko-posko tersebut akan melakukan pengecekan pada Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan atau diperintahkan memutar balik.

Untuk perbatasan Sumut dengan Aceh ada enam pos yang dibentuk, tiga di Langkat (Desa Halaban, Desa Air Hitam dan Kelurahan Sei Dendang), satu di Pakpak Bharat (Pakpak Bharat-Subussalam), satu di Karo (Desa Lau Baleng) dan satu di Tapeng (Jalan Madumas-Singkil). Sementara itu untuk perbatasan dengan Sumatera Barat ada dua pos yaitu di Muara Sipongi dan Penyabungan, dan dua pos untuk Perbatasan dengan Riau (Palas-Rokan Hulu) dan Torgamba di Labuhanbatu.

“Petugas kita akan bekerja 24 jam di setiap posko, walaupun begitu tentu ada pengecualian yang diberikan seperti bekerja atau dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, ibu hamil atau kepentingan persalinan. Tentu ini harus dibuktikan secara otentik untuk bisa melanjutkan perjalanan,” kata Edy Rahmayadi usai rapat Peniadaan Mudik Lebaran bersama FKPD dan Bupati/Walikota se-Sumut.

Edy Rahmayadi juga meminta kepada Bupati/walikota se-Sumut untuk kembali mengaktifkan Satgas Penanganan Covid-19 untuk menegakkan protokol kesehatan. Selain itu, sesuai dengan hasil kesepakatan Salat Id tidak berpusat di satu titik, tetapi menyebar di masjid-masjid, tidak ada pawai takbiran dan tidak diperbolehkan open house.

“Masyarakat kita ini sudah mulai kendur kedisiplinan protokol kesehatannya, jadi aktifkan kembali Satgas, pantau orang beribadah dan pantau tempat-tempat yang ramai, semua harus sesuai prokes. Salat Id di masjid lingkungan masing-masing, tidak seperti sebelum-sebelumnya berkumpul di satu lapangan, atau satu masjid, menyebar ke semua masjid atau tempat salat Id. Pawai takbiran tidak ada begitu juga open house, kita harus tahan diri,” kata Edy Rahmayadi.

Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Valentino mengatakan sekarang peniadaan mudik memasuki periode pengetatan yang dimulai dari 22 April hingga 5 Mei 2021. Periode peniadaan mudik akan dilakukan mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021, kemudian dilanjutkan kembali dengan masa pengetatan dari 18 Mei hingga 24 Mei.



Kedua fase ini memiliki ketentuan-ketentuan masing-masing untuk pelaku perjalanan. Untuk masa pengetatan tidak diperlukan izin perjalanan, tetapi harus melengkapi dokumen kesehatan hasil tes negatif RT-PCR/Rapid Test Antigen maksimal 1X24 Jam atau test negatif genose C19 sebelum keberangkatan.

Sedangkan saat masa peniadaan diharuskan memiliki izin perjalanan untuk yang bekerja, sedangkan untuk kunjungan keluarga sakit, meninggal atau kepentingan persalinan memiliki bukti yang kuat. Selain itu, pelaku perjalanan juga harus dilengkapi dokumen hasil test negatif RT-PCR maksimal 3X24 Jam, untuk Rapid Test Antigen maksimal 2X24 Jam dan genose c19 sebelum keberangkatan.

“Tanggal 6 (Mei) kami sudah akan melakukan operasi peniadaan mudik Lebaran, tetapi prediksi kami lonjakan lalulintas yang padat akan terjadi weekend sebelum lebaran, mungkin sekitar tanggal 9,10,11 April,” jelasnya.

Turut hadir secara langsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Walikota Medan Bobby Nasution, Walikota Binjai Amir Hamzah, Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar, Kepala BPBD Provinsi Sumut Mahfullah Pratama Daulay serta Forkopimda Sumut. Selain itu, juga hadir secara virtual Walikota/Bupati se-Sumut beserta dengan OPD.

## **5. Dinas Perumahan dan Permukiman Provsu Peduli**

## Dinas Perumahan dan Permukiman Provsu Peduli



Medan – Dalam rangka Bulan Suci Ramadhan 1442 H, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Supryanto didampingi oleh Sekretaris dan para pejabat eselon III dan IV mengunjungi dan sekaligus memberikan bantuan sembako ke Panti Asuhan Alwashliyah di Jalan Karya No. 26 Medan Johor (11/05).

Kunjungan disambut oleh perwakilan Panti Asuhan Alwashliyah, bantuan yang diserahkan terdiri dari beras, telur, gula, kecap dan mie instan. Pada kesempatan tersebut pihak panti asuhan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Dinas PKP Provsu.



## 6. Sidak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ke Dinas PKP Provsu

May 17, 2021 Berita & Kegiatan |

### Sidak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Ke Dinas PKP Provsu



Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Saat melakukan sidak, Gubsu Edy Rahmayadi melakukan apel pegawai di halaman Kantor Dinas PKP Provsu (17/05)

Apel pegawai hari pertama kerja setelah libur lebaran Idulfitri 1442 H, Edy memeriksa jumlah kehadiran dengan jumlah pegawai yang ada di Dinas PKP Provsu. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga mengingatkan untuk bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada dan bekerja dengan ikhlas dan loyal terhadap pekerjaan yang dilakukan. Selain itu Gubernur juga mengingatkan pentingnya untuk menjaga kebersihan di lingkungan kantor.



## 7. Audiensi Bupati Kab. Samosir ke Dinas PKP Provsu

May 19, 2021 Berita & Kegiatan |

### Audiensi Bupati Kab. Samosir ke Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara



Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Supryanto menerima kunjungan kerja dari Bupati Samosir Vandiko T Gultom. Pertemuan diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (Rabu 19/05).

Dalam Kunjungannya Vandiko didampingi Kepala Bappeda Kab. Samosir, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanian (DPRKPP) Kab. Samosir, Kadis Pekerjaan Umum, Kadis Perhubungan, Kadis Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir. “kami merasa perlu untuk berkoordinasi dengan pemprov, minggu lalu kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur

Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Koordinasi tersebut disambut baik oleh Gubernur Sumut dan Pak Gubernur meminta kepada Kabupaten/Kota untuk sering berkoordinasi agar terjadi menjadi sinergi. Kami juga membawa usulan peningkatan Kawasan kumuh dan bantuan Rehabilitasi RTLH sebanyak 200 unit” ujarnya.

Kepala Bappeda Kab. Samosir Rudi Siahaan menambahkan “di Samosir masih banyak daerah Kawasan kumuh, kami setiap tahun juga mempunyai anggaran dari Kabupaten namun kami juga meminta bantuan dari provinsi dan pusat karena anggaran Kabupaten yang terbatas” imbuhnya.

Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto menjelaskan “mengenai bantuan RTLH sudah ada kewenangan yang terbagi atas <10 Ha merupakan kewenangan Kab/Kota, 10-15 Ha merupakan kewenangan Provinsi dan luasan diatas >15 Ha merupakan kewenangan pusat. Kami juga lagi membuat draf untuk pergub mengenai kewenangan untuk membuat alokasi khusus untuk menangani RTLH ini. Mengenai jumlah yang akan didapat oleh Kabupaten/Kota keputusan ada di Komisi D DPRD Provinsi. Untuk pengajuan usulan TA. 2022 kami meminta kepada Pemkab untuk ikut mengawal bersama usulan di DPRD Provinsi, dan sesuai kewenangan Provinsi akan menangani RTLH dengan luasan 10 – 15 Ha dengan pengusulan dan dokumen yang lengkap karena nanti setelah diterima kami akan melakukan pengecekan kesesuaian dengan SK Bupati dengan pengecekan langsung ke lapangan” paparnya.

Kabid Rumah Swadaya Indra Sakti Harahap menambahkan “untuk tahun 2021 Kab. Samosir tidak mendapat bantuan, untuk usulan tahun 2022 kami meminta untuk pemkab bersama-sama mengawal usulan dan memperhatikan persyaratan penerima bantuan RTLH” tambahnya.

Kabid Kawasan Permukiman Herizal Pulungan juga menanggapi “mengenai usulan yang ada pada musrembang kemarin ada dokumen yang belum lengkap dan belum diserahkan dan diharapkan melengkapi dokumen yang belu, selesai dan segera disegerakan, dan berharap agar Kab. Samosir mendaapat bantuan untuk tahun 2022” ujarnya.

Kabid PSU Hadasa Manurung mengatakan “Tahun 2021 PSU mengadakan kegiatan di Onan Sipolo di Palipi dan masih tahap lelang, kami memohon dengan sangat agar setelah pengeringan selesai Pemkab Samosir dapat menerimanya sebagai asset, dan mohon kepada Pemkab untuk membantu warga agar menerima adanya bantuan pekerjaan PSU dari luar kabupaten” katanya.

Sekretaris Dinas PKP Andi Subrata menambahkan “kami sedang menyiapkan aplikasi untuk pengusulan/penginputan data RTLH sesuai dengan kewenangan Provinsi sebesar 10 – 15 Ha dan di dalam aplikasi nanti membuat penetapan titik koordinat dan setelah usulan masuk tim survei akan mengecek langsung sesuai dengan koordinat dan sesuai dalam SK Kumuh Bupati dengan kesesuaian dan validasi data yang di input dalam aplikasi.

Acara Koordinasi diakhiri dengan foto bersama.



## 8. Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kab. Tapanuli Utara ke Dinas PKP Provsu

May 20, 2021 Berita & Kegiatan

### Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kab. Tapanuli Utara ke Dinas PKP Provsu



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja DPRD Komisi C Kab. Tapanuli Utara. Kunjungan ini dipimpin oleh Royal Simanjuntak, pertemuan ini diadakan di Aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (Kamis, 20/05)

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Dinas PKP Supryanto didampingi Kabid Rumah Swadaya Indra Sakti Harahap. Dalam kunjungannya Komisi C DPRD Kab. Taput bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara ingin berkoordinasi mengenai bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Royal

Simanjuntak "Taput masih banyak warga miskin, ada sekitar 13.000 (tiga belas ribu) unit Rumah Tidak Layak Huni dan perlu mendapat bantuan. Kami berterimakasih tahun 2021 Tapanuli mendapat bantuan 50 unit rumah, kami mengharapkan tahun 2022 akan mendapatkan bantuan sebanyak 250 unit rumah" ujarnya.

Robert Marbun dari Dinas PKP Kab. Tapanuli Utara menambahkan "banyak kendala bantuan RTLH yang ada di Taput, banyak warga yang tidak dapat terverifikasi datanya karena belum memiliki legalitas tanah sehingga sering gagal verifikasi, dan warga yang merasa tidak mampu membuat laporan setelah menerima bantuan dan warga juga mengeluhkan karena adanya jumlah minimal kelompok pokmas" tambahnya.

Selanjutnya Kepala Bidang Rumah Swadaya menjelaskan "penerima bantuan RTLH harus sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku. Pemkab Tapanuli Utara juga harus memberdayakan perangkat desa untuk membantu memfasilitasi masyarakat atau warganya untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan RTLH sehingga dapat meminimalkan masalah ataupun kendala. Selanjutnya warga juga harus ikut berswadaya karena itu adalah tujuan dari program ini" jelasnya.

Kepala Dinas PKP Provsu menambahkan "saya merasa Pemkab harus membantu atau menyelesaikan masalah warganya, seperti legalitas tanah bisa dikoordinasikan dengan kepala desa untuk membantu membuatkan surat keterangan, jika warga yang menerima bantuan tidak mampu membuat laporan Dinas Perumahan Kab. Taput bisa memberikan pendampingan terhadap warganya. Kami meminta proaktif koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Taput dengan Dinas PKP Provsu dalam rangka mempersiapkan diri untuk menerima bantuan RTLH.

Acara diskusi diakhiri dengan foto bersama.



## **9. Kepala Dinas PKP Provsu menghadiri undangan Walikota Medan dalam acara Coffe Morning**

May 27, 2021 Berita & Kegiatan |

### **Kepala Dinas PKP Provsu menghadiri undangan Walikota Medan dalam acara Coffee Morning**



Medan– Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto menghadiri undangan Walikota Medan dalam acara Coffee Morning dengan tema Kolaborasi Program Antara Pemerintah Kota Medan, Balai Di Lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Percepatan Penanganan Infrastruktur di Kota Medan (27/05).

Acara yang dimoderator oleh Kepala Dinas Perkim Taru Kota Medan diawali dengan bincang – bincang dan sarapan bersama, sehingga acara lebih santai. Hadir diacara tersebut para kepala balai kementerian PUPR di Sumut yaitu Balai Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Balai Penyediaan Perumahan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Balai PBJ, Balai Pengembangan Kompetensi, dan dari Pemprovsu yaitu Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, Dinas SDA CK TR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan. Walikota Medan Bobby Nasution dalam sambutannya menyampaikan 5 Program Prioritas Kota Medan kedepan, salah satunya adalah pembangunan Infrastruktur antara lain berupa jalan, pengendalian banjir, pencegahan kawasan kumuh. Walikota juga menekankan pada kualitas jalan yang dirasakan cepat rusak walau sudah ditangani. Keinginan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat yang walikota terima.

Dalam kesempatan tersebut Kelapa Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa Dinas PKP Provinsi siap berkolaborasi, tawaran yang disampaikan adalah penanganan infrastuktur di kota medan adalah Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Utara Medan, Masterplan dan DED untuk penanganan kawasan tersebut telah tersedia. Lokasi utara medan tersebut sesuai dengan SK kumuh kota medan yaitu Kawas Kota Cina Medan Marelan dan Kawasan Mangrove Medan Marelan. Acara diakhiri dengan Penyerahan dokumen penanganan utara medan oleh Kadis PKP Provsu kepada Walikota Medan dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.



## 10. Dinas PKP Menerima Kunjungan PANSUS Kota Gunung Sitoli

May 27, 2021 Berita & Kegiatan |

### Dinas PKP Provsu menerima kunjungan PANSUS DPRD Kota Gunung Sitoli bersama dengan Dinas Perkim Kota Gunung Sotoli

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan PANSUS DPRD Kota Gunung Sitoli bersama dengan Dinas Perkim Kota Gunung Sotoli. Kunjungan diterima di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (Kamis, 27/05).

Kunjungan kerja disambut oleh Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata didampingi oleh Pejabat Eselon III dan Eselon IV. Dalam kunjungannya PANSUS DPRD Kota Gunung Sitoli ingin berkoordinasi dan konsultasi mengenai Raperda tentang penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan. Trimen V. Harefa "Nias daerah sedang berkembang, banyak perumahan yang dibangun atas nama pribadi, tetapi tidak membangun PSU secara layak lalu setelah terbangun mereka menjual, apakah pemerintah kota bisa ikut mengintervensi kegiatan pemgembangan secara pribadi bukan perusahaan, teknis pelaksanaan PSU dari pengembang ke pemerintah seperti apa, agar kami yang melakukan pengawasan bisa secara efektif?" ujarnya.

Arosokhi Harefa "Di Gunung Sitoli saat ini banyak perumahan yang pengembangnya sudah bangkrut dan belum menyerahkan PSU ke pemda, bagaimana pemda bisa ikut membantu menangani PSU yang belum diserahkan ke pemda? tambahnya.

Anda Subrata menjelaskan "pengembang tidak totalitas tidak masuk katagori pengembang artinya dia memanfaatkan fasilitas umum sarana prasarana pemerintah seperti dia membangun dipinggir jalan yang sarana umum jalannya itu jalan pemerintah katagori ini tidak masuk dalam pengembang walaupun membangun perumahan. Dalam konteks pembangunan perumahan berkaitan dengan tersedianya rencana tata ruang apakah sudah memang benar dibangun perumahan, pengembang perumahan harus kompleks, karena akan tersedia fasilitas sarana prasarana utilitas, sekolah, ruang terbuka hijau, perdagangan. Untuk membuat perumahan sudah terpola pada pola ruang, perumahan boleh tempat usaha karena mendukung aksesibilitas pada masyarakat yang ada dan harus sudah direncanakan dari awal tidak. Ini sebenarnya pengawasan bangunan dan perencanaan izin, disamping mengeluarkan izin harus mengawasi, pada saat perumahan tetapi tidak dibangun sesuai" jelasnya.



Kabid PSU Dinas PKP Provsu Hadasa Manurung menambahkan "pada 2017 pemprov masih terlibat pembangunan PSU dalam komplek saat itu sesuai anjuran pemerintah pusat untuk mendukung gerakan sejahtera rumah Presiden Jokowi, provinsi membantu pengembang khusus perumahan MBR yang harga jualnya dipatok oleh pemerintah tidak boleh lebih dari 150jt dan penyaluran melalui FLPP itu wajib dibantu oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota, bantuan daerah merupakan kemudahan izin pembangunan dan kemudahan lainnya, dari provinsi kita bisa membantu PSU dalam perumahan. Sejak 2020

kami tidak lagi menangani PSU didalam perumahan komplek MBR karena sudah dijelaskan dalam rakortek Bappenas, mana merupakan kewenangan pusat, provinsi dan daerah" tambahnya.

"Jika DPRD membuat peraturan ini maka harus konsisten bertanggung jawabnya. Kewenangan Provinsi membangun PSU yang ada di daerah perbatasan kabupaten/kota, sementara PSU dalam komplek ke sarana kabupaten/kota. Kewajiban pembangunan PSU dalam Komplek merupakan kewajiban pengembang namun menghubungkan fasilitas drainase atau pembuangan limbah dari dalam kompleks ke fasilitas kab/kota merupakan tanggung jawab Kab/kota. PSU perumahan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib diserahkan kepada pemerintah daerah, namun bila developer nya sudah tidak dapat ditemui lagi, penghuni komplek bisa menyerahkan asset mereka menjadi jalan desa lalu desa menyerahkan ke kecamatan dan seterusnya sama seperti lingkungan permukiman biasa dan sudah menjadi asset kab/kota"imbuhnya.

Acara diakhiri dengan foto bersama.

## Kadis PKP Provsu Membuka Rapat Pokja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Utara Ir. Supryanto, MM membuka kegiatan Rapat Pokja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grandika Setia Budi Medan, Kamis (3/6).

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Rapat Pokja Ir. Herizal Ananda Pulungan M.Si menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelengaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Provinsi Sumatera Utara. "kegiatan ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 12 Tahun 2020 yang mana telah terbentuk kelembagaan Pokja di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yakni Pokja PPAS (Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Bersih dan Sanitasi) dan Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) maka perlu dilakukan penggabungan kelembagaan Pokja tersebut" ucapnya.

Ir. Supryanto, MM menyebutkan bahwa Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk menyinergikan kebijakan, Kelembagaan, Penyelengaraan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, tukar pikiran dan Koordinasi. Pokja PKP merupakan salah satu Instrumen

penyelengaraan PKP, wadah ini dibentuk secara formal dan dilembagakan dengan Surat Keputusan. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja PKP bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. H. Anda Subrata, M.Si memimpin jalannya rapat Pokja menjelaskan bahwa Pokja ini akan memberikan manfaat yang besar bagi daerah untuk PKP kedepan seperti :

1. Terlaksananya proses pembangunan PKP yang mampu mengakomodasikan kepentingan pemerintah sebagai regulator, pengembang, penyedia dan penerima manfaat sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang tidak diinginkan.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terbantu dalam proses sosialisasi mengenai kebijakan – kebijakan terkait pembangunan PKP.
3. Terbangunnya koordinasi yang lebih baik dalam mensinergikan arah pembangunan PKP sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
4. Tersedianya jalur komunikasi dan artikulasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan PKP di daerah.

Hadir dalam kegiatan ini OPD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Balai PPW Sumatera Utara.(nanda)



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan PANSUS DPRD Kab. Karo bersama dengan Dinas Perkim Kab. Karo



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan PANSUS DPRD Kab. Karo bersama dengan Dinas Perkim Kab. Karo. Pertemuan diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 (Kamis, 01/07).

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman bersama dengan Kepala Bidang PSU dan Rumah Swadaya mewakili Kepala Dinas PKP Provsu. Dalam kunjungannya Pansus DPRD Kab. Karo ingin berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai Ranperda tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Pada kesempatan tersebut anggota DPRD Kab. Karo

Firdaus Tarigan mempertanyakan "tentang standar luasan perumahan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam ranperda ini. Rencana relokasi kepada masyarakat yang terdampak erupsi gunung Sinabung dirasakan kurang maksimal dan tidak terakomodir dengan baik, sehingga masyarakat membeli tanah dan membangun rumah secara berkelompok" ujarnya.

"dikarenakan ada penghapusan terhadap sepuluh desa menyebabkan masyarakatnya jadi terpencar ditambah lagi dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang belum selesai sehingga muncul perumahan baru yang belum mengakomodir RTRW tersebut" tambahnya.

Menaggapi pertanyaan anggota DPRD Kab. Karo, Hadasa Manurung menjelaskan "dengan adanya peraturan ini pemerintah dapat mempertimbangkan besaran luasan perumahan yang PSU nya harus diserahkan ke pemerintah, agar masyarakat bisa mengakses PSU yang ada di dalam perumahan" ujarnya. Selama ini banyak perumahan yang aksesnya terbatas/mengekslusifkan hanya untuk penghuni di dalam komplek, sehingga tidak terakses/terjangkau oleh masyarakat diluar komplek" jelasnya.

"mengenai perumahan yang dibangun tanpa mempertimbangkan RTRW mengingat kondisi rawan bencana, seharusnya karena di daerah rawan bencana kita harus lebih tegas dalam hal pemberian izin harus benar-benar mengacu pada RTRW karena kondisi lingkungan yang sedikit ekstrim dari lingkungan lain, jika tidak sesuai dengan RTRW harus tolak perizinannya kecuali Kab/Kota mengambil kebijakan untuk merevisi RTRW mengingat kebutuhan lahan, bencana alam tidak bisa dijadikan dasar untuk mempermudah perizinan jika tidak sesuai dengan RTRW" jelasnya.

Kemudian Hadasa menambahkan "dalam peraturan disebutkan PSU yang diserahkan itu paling lama satu tahun setelah semuanya selesai, pemerintah menerima yang sudah selesai seluruh fasilitas dan penyerahan ini tidak merugikan developer dan kab/kota juga harus mengetahui tanggung jawab sebagai penerima untuk memelihara PSU beralih dari developer ke pemerintah sebagai sarana untuk umum" ujarnya.

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan Diaz Novariza dari Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Provsu



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan Diaz Novariza dari Biro Administrasi Pembangunan dan PBJ Provsu yang diterima oleh Herizal Pulungan Kabid Kawasan Pertemuan diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 (Kamis, 22/7).

Dalam kunjungannya Diaz memberikan arahan dan sosialisasi mengenai “BELA (Belanja Langsung) Pengadaan ini merupakan program langsung dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan program ini melekat pada aplikasi LPSE dan bisa digunakan oleh semua akun yang terdaftar di LPSE.” ujarnya.

“Dalam BELA Pengadaan ada 12 mitra tetapi yang ada di medan

baru dua yaitu GRAB dan Bhineka. Aplikasi BELA Pengadaan dapat dimplementasikan di seluruh pemerintah daerah untuk belanja langsung dibawah 50 juta. Dengan aplikasi BELA Pengadaan ini diharapkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM menjadi lebih inklusif serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa” tambahnya.

“Sesuai instruksi Gubernur yang meminta kepada seluruh OPD untuk menggunakan BELA Pengadaan dan melaporkan bagaimana pelaksanaan dan apa saja kendala yang dihadapi” tutupnya.(ulfa)



## Dinas PKP Provsu menerima kunjungan kerja Bupati Nias Barat

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja dari Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu berserta rombongan di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (Selasa 07/09).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kadis PKP Provsu Supryanto didampingi oleh Bidang Rumah Swadaya Medy Juliana, Bidang Kawasan Permukiman Armada Syahputra Bidang, Rumah Umum Bona Simon Sinaga. Dalam kunjungannya Khenoki Waruwu ingin mendiskusikan mengenai bantuan yang bisa diberikan Dinas PKP Provsu untuk masyarakat kab. Nias Barat yang banyak sekali warga di kab. Nias Barat memiliki rumah tidak layak huni dan apa saja yang harus disiapkan untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemprovsu.



Dalam pertemuan ini Supryanto menjelaskan “Perlu SK Kawasan Kumuh Nias Barat sebagai syarat awal untuk mendapatkan bantuan RTLH dari Dinas PKP Provsu, kewenangan provinsi dengan luasan 10 – 15 Ha kemudian masukan masukan usulan melalui Dinas PKP Nias Barat dan jika ada perwakilan di DPRD bisa ikut membantu mengawal agar daerah Kab. Nias Barat ikut

masuk dalam daerah penerima RTLH. Selain ketentuan lokasi rumah harus berada pada Kawasan Kumuh. Warga yang mendapat bantuan adalah termasuk masyarakat kurang mampu dengan penghasilan dibawah atau sama dengan upah minimum regional, rumah dan tanah yang ditempati harus milik sendiri. Rehabilitasi RTLH ditujukan agar masyarakat dapat menghuni Rumah yang layak. Terdapat 4 indikator akses rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan (atap, dinding dan lantai yang memenuhi syarat), memiliki akses air minum layak, kecukupan tempat tinggal > 7,2m per kapita dan memiliki sanitasi yang layak” ujarnya.



Medy Juliana menambahkan “bantuan Rehabilitasi RTLH dari pemprovsu bersifat stimulan kepada warga menjadi ikut berswadaya dalam membangun rumah layak huni. Dengan bantuan 30 juta dibagi 26jt untuk bahan dan 4 jt untuk upah pembangunan cukup untuk membuat rumah ukuran dengan maksimal 30m<sup>2</sup> menjadi rumah layak huni dengan dinding plaster dan lantai rabat beton” tambah medy.

Bona Simon Sinaga menjelaskan “bidang rumah umum mengerjakan bantuan pembangunan rumah khusus untuk rumah yang terdampak korban bencana alam atau rumah korban pembangunan pemerintah yang bisa dibangunkan dari awal pembangunan rumah” jelasnya.(ulfa)

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja dari DPRD Komisi III Kab. Nias Selatan



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja dari DPRD Komisi III Kab. Nias Selatan. Pertemuan diadakan di Aula Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 (Rabu, 22/09).

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Bidang Rumah Swadaya Indra Sakti Harahap mewakili Kepala Dinas PKP Provsu. Dalam kunjungannya Komisi III DPRD Kab. Nias Selatan ingin berkoordinasi dan konsultasi mengenai peran DPRD dalam mendukung dan mengawasi Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Pada kesempatan tersebut wakil ketua Komisi III Ferisman Ndrruru menyampaikan "di Kab. Nias Selatan sangat diharapkan untuk mendapat bantuan bangunan renovasi RTLH. Kami mendapat info dari dinas perkim Nias Selatan

kalau Nias Selatan tidak mendapat bantuan, bagaimana peran dan sikap DPRD agar bisa mendapat bantuan RTLH" ujarnya. Komisi III DPRD Kab. Nias Selatan Pegangan Dhaki menambahkan "bagaimana alur pelaksanaan bantuan RTLH hingga sampai di masyarakat" tambahnya.

Indra Sakti Harahap menjelaskan "DPRD berperan besar untuk bisa mendapatkan bantuan RTLH, persyaratan warga untuk mendapat bantuan adalah memiliki KTP, KK, Pendapatan maksimal umr, memiliki surat tanah dan sudah dua tahun tinggal, mau berswadaya dan harus berada di dalam kawasan SK Kumuh yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Persyaratan ini dikuasai oleh Dinas PKP Kab. Nias Selatan dan data penerima dapat disampaikan melalui musrembang yang diajukan oleh Dinas PKP Kab. Nias Selatan. DPRD Nias Selatan berperan untuk mengawal usulan di Komisi D DPRD Provinsi agar sinkron dengan pengusulan melalui pokir DPRD Provinsi Sumatera Utara" jelasnya.

"alur pelaksanaan dimulai dari adanya SK Kumuh Kab. Nias Selatan kemudian Dinas PKP Nias Selatan mendata warga yang terdapat di dalam Kawasan kumuh, dan sesuai kewenangan Provinsi akan menangani RTLH dengan luasan 10 – 15 Ha dengan pengusulan dan dokumen yang lengkap karena nanti setelah diterima kami akan melakukan pengecekan kesesuaian dengan SK Bupati dengan pengecekan langsung ke lapangan didampingi oleh TFL" tambah indra.

Acara diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)



## KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU MEMBUKA KEGIATAN RAPAT POKJA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Utara Ir. Supryanto, MM membuka kegiatan Rapat Pokja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan, Selasa (12/10).

Ir. Supryanto, MM menyebutkan bahwa Pokja PKP wadah peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP dilakukan dengan memberikan masukan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan PKP, Pelaksanaan Pembangunan PKP, Pemanfaatan PKP, Pemeliharaan dan Perbaikan PKP dan Pengendalian Penyelenggaraan PKP.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Rapat Pokja Ir. Herizal

Ananda Pulungan M.Si menyatakan bahwa maksud dari Rapat Kerja Pokja PKP ini adalah merumuskan Tugas dan Fungsi, serta rencana kerja Pokja PKP Provsu, Mengidentifikasi unsur calon Forum PKP Provsu , dan mekanisme kerja Forum PKP Provsu serta mempersiapkan rapat pembentukan Forum PKP.

Acara diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta yang hadir.

Hadir dalam kegiatan ini OPD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, BPBD Provsu, Balai Penyediaan Perumahan Sumatera Utara serta Balai PPW Sumatera Utara.(nanda)



## Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, meninjau langsung pelaksanaan pembangunan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



Labuhan Batu Utara – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Supryanto meninjau langsung pelaksanaan pembangunan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Desa Parpudangan Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Desa Lubuk besar Kabupaten Batubara (Rabu 25/10).

Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan komitmen Pemprov Sumatera Utara untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu Untuk

memiliki rumah yang layak huni Sesuai dengan visi misi gubernur sumut

Supryanto menjelaskan "tahun ini program RTLH Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan 600 unit rumah yang tersebar di 10 Kab/Kota dan saat ini sedang ditahap pembangunan. Saya berharap pembangunan hingga selesai rehabilitasi akan berjalan aman dan lancar" jelasnya.

"Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu me



Lokasi : Desa Parpudangan, Kab Labuhanbatu Utara



Lokasi: Desa Lubuk Besar, Kab. Batubara

ngurangi backlog perumahan dan agar menstimulus masyarakat agar bias berswadaya dan mampu memiliki rumah layak huni" tambahnya.

Sejumlah warga penerima program Rehabilitasi RTLH mengaku sangat senang dan sangat terbantu dan berharap program ini akan terus ada agar banyak lagi masyarakat yang dapat merasakan manfaat bantuan program ini. (ulf)

## Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto membuka acara Rapat Koordinasi II: Finalisasi Basis Data PKP dan Finalisasi Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara



Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto membuka acara Rapat Koordinasi II: Finalisasi Basis Data PKP dan Finalisasi Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara di Hotel Radisson Medan Jl. H. Adam Malik No.5 Medan Petisah (Senin, 08/11).

Dalam pembukaannya Supryanto menyampaikan "saat ini kita sedang menghadapi masalah backlog, permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, rumah terdampak bencana dan lain sebagainya. Karena itu pemerintah provsu bertekat dan komit untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah dituangkan di

RPJMD 2019-2023, dalam visi Sumatera Utara Yang Maju dan Bermartabat visi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak sehat dan terjangkau serta didukung sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai".

Kemudian supryanto menambahkan "tentulah pencapaian hunian yang layak sehat dan terjangkau itu tidak dapat dicapai tanpa adanya keterpaduan perencanaan dan keterpaduan dalam pelaksanaannya. Karenanya keberhasilan pembangunan PKP ini sangat bergantung pada sinergitas antara seluruh OPD serta singkronnya program ini dari tingkat pusat hingga ke daerah" tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan paparan konsolidasi data supply dan demand perumahan, konsolidasi urusan pkp di daerah dan konsolidasi urusan PKP di daerah. (ulfa)

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan Pansus DPRD Kab. Asahan bersama dengan Dinas Perkim Kab. Asahan



Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan Pansus DPRD Kab. Asahan bersama dengan Dinas Perkim Kab. Asahan. Kunjungan diterima di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (Kamis, 11/11).

Kunjungan kerja disambut oleh Zubir Kabid Rumah Umum didampingi oleh Pejabat Eselon III dan IV. Dalam kunjungannya Pansus DPRD Kab. Asahan ingin berdiskusi mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Noura Nst “warung-warung pinggir jalan lintas sumatera apakah masuk dalam kategori kumuh yang masuk dalam ranperda? Dan dinas perkim Kab. Asahan juga merasa perlu

pembinaan untuk pembuatan profil kumuh dari Dinas PKP Provsu” ujarnya.

Yuni Kurniasih selaku Kasi Bid. Kawasan Permukiman menjelaskan “Pencegahan dan pembinaan dari Dinas PKP Provsu memang belum ada pembinaan, untuk tim verifikasi SK Kumuh Provsu sedang dibentuk oleh Bapak Gubernur. Kalau warung-warung yang berada di sepanjang jalan lintas masuk atau tidak dalam kumuh bisa merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, dan merujuk pada Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, jika masuk dalam salah satu point pada tipologi perumahan baru bisa masuk katagori perumahan kumuh atau permukiman kumuh” jelasnya.

Pertemuan diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan Komisi C DPRD Kab. Labuhanbatu Utara berserta Dinas PKP Kab. Labuhanbatu Utara

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan Komisi C DPRD Kab. Labuhanbatu Utara berserta Dinas PKP Kab. Labuhanbatu Utara. Kunjungan diterima di Aula Dinas PKP Provsu Jl. Ah. Nasution No. 20 Medan (Senin, 15/11).

Kunjungan kerja disambut oleh Indra Sakti Harahap Kabid Rumah Swadaya di dampingi pejabat Eselon III dan Eselon IV. Dalam kunjungannya Komisi C DPRD Kab. Labura ingin berkonsultasi mengenai bantuan RTLH. Ismarlin bertanya "bagaimana syarat-syarat yang dibutuhkan agar Kab. Labura mendapat bantuan RTLH?" Kemudian Tuni Pramono menambahkan "bagaimana mengenai bantuan rumah bagi yang terdampak banjir bandang di Kab. Labuhanbatu Utara sampai saat ini belum ada realisasinya".

Indra Sakti Harahap menjelaskan "tahun ini kabupaten labura mendapatkan bantuan sebanyak 100 unit, untuk rumah yang terpilih melalui tim teknis yang ditentukan kabupaten. Kemudian penerima manfaat akan membentuk pokmas dan penerima manfaat akan diverifikasi jika dalam verifikasi penerima manfaat tidak memenuhi syarat akan diganti dengan list penerima

manfaat yang sudah ada ditentukan oleh Kabupaten. Syarat sebagai penerima manfaat memiliki KTP, KK minimal sudah 2thn berkeluarga, surat tanah kepemilikan, pendapatan ump. Pada rembuk II sudah final ketetapan siapa penerima manfaat dan pada rembuk II warga penerima manfaat yang akan memilih panglong sendiri dan menegos didampingi oleh TFL. Saat melakukan pembangunan rumah juga tidak dibongkar 100% ada bagian yang disisakan untuk menjadi tempat tinggal. Untuk di Kab. Labura saat ini pembangunan sudah diatas 50%.

Salmarianto Kasubbag Program menambahkan "mengenai bantuan rumah relokasi untuk

korban banjir bandang di Kab. Labura telah dilakukan koordinasi dengan dinas PKP Kab. Labura. Saat ini Pemprov Sumut menunggu Rencana Aksi dan ketersediaan lahan Rencana Aksi akan menjelaskan peran masing-masing pihak dalam penanganan rumah korban bencana tersebut".

Acara diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)



## Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto menjadi narasumber dalam rangka Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Delapan Prioritas Pembangunan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023



Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto menjadi narasumber dalam rangka Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Delapan Prioritas Pembangunan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 di Hotel Grand Mercure Jl. Sutomo No.1 Medan. (Kamis, 18/11)

Dalam paparannya Supryanto menyampaikan "rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuni serta asset bagi pemiliknya. Menurut PP 14/2016 Pasal 108 ada delapan kriteria mulai dari bangunan gedung, jalan lungkungan,

drainase lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Saat ini Luas Kawasan perumahan kumuh di Sumatera Utara 10.350,52 Ha yang tersebar di 32 Kabupaten dan Kota. Yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 1.490,51 Ha yang tersebar di 24 Kabupaten dan kota." Ujarnya.

Supryanto juga menjelaskan "Agar Akses Rumah Layak Huni dapat meningkat di Tahun 2022 s.d 2023 Perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas rumah yang telah ada dari kondisi tidak layak huni menjadi rumah layak huni, serta memastikan rumah yang baru yang akan dibangun oleh pengembang perumahan maupun oleh masyarakat secara swadaya sudah memenuhi indikator layak huni. Untuk wara yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni tetapi kurang memiliki kemampuan mewujudkan rumah layak huni terutama yang berada pada kawasan kumuh kewenangan pemerintah provinsi akan dibantu langsung oleh Pemprovsu. Pemprovsu akan bekerjasama dan mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten / Kota serta Badan Usaha agar berperan lebih aktif meningkatkan kualitas hunian masyarakat Sumatera Utara memperhatikan ketersediaan SDM pengelola kegiatan yang terbatas dan Keuangan Pemprovsu Ditargetkan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 2022-2023 sebanyak 1000 unit rumah" jelasnya./ulfah

## FGD Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Melalui Dukungan Kab/Kota Terhadap kegiatan Stategis Daerah Provinsi Sumatera Utara



Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto menjadi narasumber dalam FGD Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Melalui Dukungan Kab/Kota Terhadap kegiatan Stategis Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Hotel Grand Mercure Jl. Sutomo No.1 Medan (09/12).

Dalam paparannya Supryanto menyampaikan “rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai tempat tinggal yang layak huni. Saat ini Provinsi Sumatera Utara memiliki 1.4905,51 Ha yang tersebar di 24 kab/Kota. Dalam pengurangan luas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh akan dilakukan peningkatan kualitas melalui pola penanganan pemugaran dan peremajaan

kawasan. Agar Akses Rumah Layak huni dapat meningkat di tahun 2022 s.d 2023, diperlukan upaya peningkatan kualitas Rumah yang telah ada dari kondisi tidak layak huni menjadi Layak huni serta memastikan rumah yang baru akan dibangun oleh pengembang perumahan maupun oleh masyarakat secara swadaya sudah memenuhi empat indikator Rumah Layak Huni” jelasnya.

“Dengan desain perencanaan terwujudnya peningkatan kualitas hunian dan lingkungan kawasan permukiman akan berkurangnya luas kawasan kumuh dan peningkatan akses rumah layak huni dengan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 s.d 15 Ha kemudian pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi



...egis Daerah Tahun

**DAFTAR TAMU**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

NAMA : Amizaro Wardu .....

ALAMAT : Nias Utara .....

NO TELPHON : -

PEKERJAAN : Bupati .....

TUJUAN BERTAMU : .....

dan, 02 NOV 2021

PEMOHON

(.....)

**DAFTAR TAMU**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

NAMA : Marlinda .....

ALAMAT : Binjai .....

NO TELPHON : .....

PEKERJAAN : .....

TUJUAN BERTAMU : Pak Kadis .....

Medan, 2021

PEMOHON

(.....)

REI  
APERSI  
HIMPERRA

DAFTAR TAMU  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : KETUA DPD HIMPERRA SUMUT / MARUN NUR  
ALAMAT : JL. KASUARI NO. 6  
NO TELPHON : 081263223637  
PEKERJAAN : WIRASWASTA  
TUJUAN BERTAMU : .....

Medan, 17 NOVEMBER 2021

PEMOHON

Saef  
Bap  
(.....)

DAFTAR TAMU  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Futra Feb.  
ALAMAT : Jl. Penitipan Kemerdekaan  
NO TELPHON : 082277774992  
PEKERJAAN : Ibu Kedua, Unit legal dari Bappelit  
TUJUAN BERTAMU : Silaturahmi / Konsultasi

Medan, 2021

Krisma

PEMOHON

Rombongan  
dan pengawas

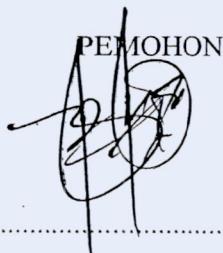
6.08.2021  
6.08.2021  
6.12.2021  
(Futra Feb.)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : W. M RAZALI Nas  
ALAMAT : TAPAK DUW - ACEH NEGARA  
NO TELPHON : 0821 6019 9660  
PEKERJAAN : KONTRAKTOR  
TUJUAN BERTAMU : HILIA W RAHMI

Medan,

2021

PEMOHON  
  
(.....)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : AHMAD WIBOWO / Ponakan PAK GUB  
ALAMAT : MABAR  
NO TELPHON : 0852 6272 4577  
PEKERJAAN : WIRASWASTA  
TUJUAN BERTAMU : Silaturahmi

Medan,

2021

PEMOHON

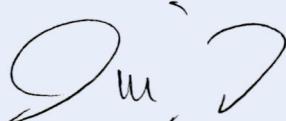
(.....)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : RICKSON H  
ALAMAT : Medan  
NO TELPHON : 081263 12532  
PEKERJAAN : Stay keba  
TUJUAN BERTAMU :

Medan, 2021

PEMOHON

  
(.....)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : ARDIANSYAH S  
ALAMAT : JL. DENAI  
NO TELPHON : 0853 7355 1041  
PEKERJAAN : MEDIA 1924.  
TUJUAN BERTAMU : STUDIO DENAI.

Medan, 21 - 09 - 2021

PEMOHON

  
(ARDIANSYAH.)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Ivan Jolyanto  
ALAMAT : Jl. Leter Brizan  
NO TELPHON : .....  
PEKERJAAN : Pramuka Luar Biasa  
TUJUAN BERTAMU : INGIN UTK FOTO Bersama Kadis

Medan,

2021

PEMOHON



(.....)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : El Rafiq Nugraha & Angke  
ALAMAT : Jl. Apt. Royal  
NO TELPHON : .....  
PEKERJAAN : .....  
TUJUAN BERTAMU : .....

Medan, 13 - 09 - 2021

PEMOHON

(.....)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Riswan Lubis.....  
ALAMAT : Jl Pelita no 3 ..  
NO TELPHON : 085832077913 ..  
PEKERJAAN : CV Sumber Bumi ..  
TUJUAN BERTAMU : Silaturahmi ..

Medan, 9 - 9 - 2021

PEMOHON

  
(Riswan Lubis)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : H. DARWIN. S.AG. MAP. (Anggota Dewan)  
ALAMAT : ..  
NO TELPHON : 0821 6407 3020 ..  
PEKERJAAN : ..  
TUJUAN BERTAMU : ..

Medan, 10 . 8 . 2021

PEMOHON

(.....)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Lisov. Whitney G. / Apotek. Saint-Nicolas.  
ALAMAT : K. Tambelan. Raya. No. 66. R. Pa. Sardige  
NO TELPHON :  
PEKERJAAN : Swasta  
TUJUAN BERTAMU :

Medan, 02 - 08 2021

PEMOHON

  
(Lisov. Whitney G.)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Mhd. Fandi  
ALAMAT : Dr. Laksana Gr. Gani No.13  
NO TELPHON : 0882 661 6573  
PEKERJAAN : Hartawan  
TUJUAN BERTAMU : Silaturahmi

Medan, 27/07 2021

PEMOHON

  
(Mhd. Fandi)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : ASWIN . S .....

ALAMAT : .....

NO TELPHON : .....

PEKERJAAN : .....

TUJUAN BERTAMU : .....

Medan, 2021

PEMOHON

(.....)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : RUSLAN .....

ALAMAT : H. Sefia Bule 99 sepanjang Jaya No. 88 D (Dari butacane)

NO TELPHON : 0821 6868 7115 .....

PEKERJAAN : Wirausaha .....

TUJUAN BERTAMU : Silaturahmi dengan Pak Kadir .....

Medan, 6 - JULI - 2021

PEMOHON

  
(Ruslan)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Ruslan  
ALAMAT : Jl. Sefia Budi gang Sepakat Jaya No.000 / tutacane  
NO TELPHON : 0821 6808 7415  
PEKERJAAN : Wiraswasta  
TUJUAN BERTAMU : Pak Kadir

Medan, 10' Juni 2021

PEMOHON

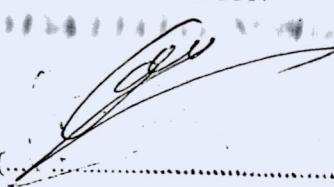
  
(.....Ruslan.....)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Cairy Setyo  
ALAMAT : Tonay - gae san st.  
NO TELPHON : 081281863387  
PEKERJAAN : Wirausaha / sel fsp Hartani  
TUJUAN BERTAMU : fsp Kadir

Medan, 3' - 06 2021

PEMOHON

  
(.....Cairy Setyo.....)

**DAFTAR TAMU**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

NAMA : maknus  
ALAMAT : Medan  
NO TELPHON : 082166966117-  
PEKERJAAN : pеканan  
TUJUAN BERTAMU : BPK KADIS

Medan, 2-4- 2021

PEMOHON

MAKNUS

**DAFTAR TAMU**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

NAMA : SAMSUL ARSY (cancel)  
ALAMAT : BLANGKEREN GAYO LUER  
NO TELPHON : 081361127575  
PEKERJAAN : KIRABUDIKA  
TUJUAN BERTAMU : ALATURAHMI

Medan, 11-5- 2021

PEMOHON

Z

(.....)

**DAFTAR TAMU**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

NAMA : Risman Lubis  
ALAMAT : Jl Cemara gg melingg depan cemara asri no 15  
NO TELPHON : 085832079913  
PEKERJAAN : CV. Sumber Baumi  
TUJUAN BERTAMU : Kordinasi

Medan, 4 - 5 - 2021

PEMOHON

Risman Lubis

**DAFTAR TAMU**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

NAMA : HELMY YACUB  
ALAMAT : KUTACANE  
NO TELPHON : 081361089599  
PEKERJAAN : WT PAPUA  
TUJUAN BERTAMU : Kordinasi

Medan, 3 Mei 2021

PEMOHON

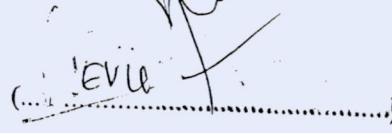
HELMY YACUB

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Ibu EVIE  
ALAMAT : TASBIH  
NO TELPHON : 0821 684 68627  
PEKERJAAN :  
TUJUAN BERTAMU : SUDAH BUAT APPOINTMENT PON Bpk. EADY

Medan, 2021

PEMOHON

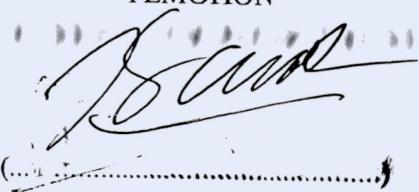


**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : ISMAR HRP  
ALAMAT : JKT  
NO TELPHON : 0821 15187268  
PEKERJAAN : SULASIA  
TUJUAN BERTAMU : KADIS

Medan, 20-4-2021

PEMOHON



**DAFTAR TAMU**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

NAMA : Mifti Niwin.  
ALAMAT : Kantor Gubu.  
NO TELPHON : .....  
PEKERJAAN : PMF.  
TUJUAN BERTAMU : Silaturrahmi.

Medan,

2021

PEMOHON

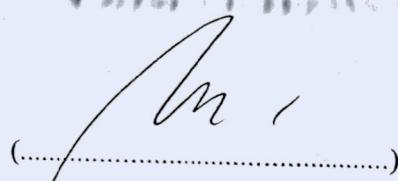


**DAFTAR TAMU**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

NAMA : Uibo-  
ALAMAT : Rejeki Su-  
NO TELPHON : .....  
PEKERJAAN : JPU-  
TUJUAN BERTAMU : SURUSAN penitig.

Medan, 2 Maret 2021

PEMOHON

  
(.....)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : *Hamis Apol.*  
ALAMAT : *KAFE KEMISAR*  
NO TELPHON : .....  
PEKERJAAN : .....  
TUJUAN BERTAMU : .....

Medan,

2021

PEMOHON

*M. NASSIR*

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : *Ayans*  
ALAMAT : *JL. SINDANGLANTA NO. 3 MEDAN*  
NO TELPHON : *081265068111*  
PEKERJAAN : *KONTRAKTOR*  
TUJUAN BERTAMU : *KONSULTASI*

Medan,

2021

PEMOHON

*Ayer*

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Rushi A. Hrp  
ALAMAT : Perumnas Medan Staff D PRD (Parharun)  
NO TELPHON : 0823 7020 1707  
PEKERJAAN : Sast  
TUJUAN BERTAMU : Disuruh kerjakan

Medan, 2021

PEMOHON

Rushi A. Hrp

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : DRs. YUSRIZAL,S  
ALAMAT : MEDAN (PADANG BULAN)  
NO TELPHON : 0853 7073 5245  
PEKERJAAN : PENSUANW DINAS PU AGENSI PERGAM  
TUJUAN BERTAMU : STAKURRATMI (KANGGUUDAH CAMO)  
BKK KETEPUI)

Medan, 8 MARET 2021

PEMOHON

DRs. Yusrizal,S

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Egi .....

ALAMAT : Jl. DIPONGBOKO Kantor Babsw .....

NO TELPHON : 0821 68 311036 .....

PEKERJAAN : BKO DPPIM .....

TUJUAN BERTAMU : .....

Medan, 2021

PEMOHON



(.....)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Harry .....

ALAMAT : Medan .....

NO TELPHON : 08116099123 .....

PEKERJAAN : Staf Ahli Wakil KETUA DPRD SU .....

TUJUAN BERTAMU : DINAS .....

Medan, 12 Maret 2021

PEMOHON



(.....)

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : A. Rahim SURSAKTI  
ALAMAT : Jl. Bunga Cempaka  
NO TELPHON : 081269518084  
PEKERJAAN : Konsultan  
TUJUAN BERTAMU : Pak Kadis

Medan, 2021

PEMOHON

, A. Rahim Surakti

**DAFTAR TAMU**  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : Amril Gunawan  
ALAMAT : Banda Aceh  
NO TELPHON : 0813772306  
PEKERJAAN :  
TUJUAN BERTAMU : Silaturahmi

Medan, 2021

PEMOHON

(.....)